

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen

Rulfah M. Daud¹, Aida Yulia², Rifa Mauliza³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Abstract

The Covid-19 pandemic has spread throughout the world and had a significant impact on the public's economy. The government took the initiative to form a Village Fund Direct Assistance (BLT-DD) program to help the rural poor affected by Covid-19. The transparency in the planning, distribution, and reporting of this program is very much needed. In addition, accountability must be carried out clearly so as to avoid fraud or embezzlement of funds. This study aims to analyze the effect of Transparency (X1) and Accountability (X2) on the Management of Village Fund Direct Cash Assistance (Y). The data used is primary data by using a questionnaire division technique. The sample in this study were 23 villages with 69 respondents who were village officials in Kota Juang District. Data collection techniques were carried out by census, where all villages in Kota Juang District was used as the research sample. This study is a quantitative study using the Multiple Linear Regression method in data analysis, and using the t test and F test to prove the results of the hypothesis. The results of this study indicate that the transparency variable has a significant and positive effect on the BLT-DD Management variable. The accountability variable also has a significant and positive effect on the BLT-DD Management variable. Simultaneously, transparency and accountability affect the management of BLT-DD with a coefficient of determination of 31.9%.

Keywords. *Transparency, Accountability, BLT-DD, Multiple Regression Linier.*

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah berinisiatif membentuk program Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) untuk membantu masyarakat miskin pedesaan yang terdampak Covid-19. Transparansi dalam perencanaan, pendistribusian, dan pelaporan program ini sangat dibutuhkan. Selain itu, pertanggungjawaban harus dilakukan secara jelas agar tidak terjadi penyelewengan atau penggelapan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (Y). Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik pembagian angket. Sampel dalam penelitian ini adalah 23 desa dengan 69 responden yang merupakan perangkat desa di Kecamatan Kota Juang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sensus, dimana seluruh desa di Kecamatan Kota Juang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dalam analisis datanya, serta menggunakan uji t dan uji F untuk membuktikan hasil hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Pengelolaan BLT-DD. Variabel akuntabilitas juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Pengelolaan BLT-DD. Secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan BLT-DD dengan koefisien determinasi sebesar 31,9%.

Kata kunci. *Transparansi, Akuntabilitas, BLT-DD, Linier Regresi Berganda.*

Corresponding author. *aidayulia@unsyiah.ac.id*

How to cite this article. *Daud, R.M., Yulia, A. & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan. 10 (2), 133-143. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/39913>*

History of article. **Received:** October 2021, **Revision:** July 2022, **Published:** July 2022

PENDAHULUAN

Dampak pandemi covid-19 yang terjadi diseluruh dunia saat ini mempengaruhi perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Banyak kebijakan ataupun program yang dibuat untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Pemerintah dalam wewenangannya untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan Bantuan Sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program tahap pertama penanganan pandemi covid-19. Selanjutnya program kartu prakerja dengan mendanai masyarakat yang belum memiliki pekerjaan untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Kemudian, pemerintah juga memberikan subsidi listrik juga subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah juga memberikan salah satu bantuan yang bersumber dari dana desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (KOMPAK, 2020).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan program jaminan perlindungan sosial dan bantuan keuangan terhadap masyarakat yang kurang mampu juga kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya terutama masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 dan berdomisili di wilayah tersebut. Program ini merupakan bentuk prioritas yang dianggarkan oleh pemerintah desa yang berupa penyisihan dari alokasi dana desa pada masing-masing wilayah. Penetapan data keluarga kurang mampu di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Musdesus dihadiri oleh Badan Permusawaratan Desa, Pemerintah Desa, Relawan gugus tugas covid-19 serta unsur masyarakat. Musdesus dapat juga membahas mengenai target sasaran serta jenis program bantuan sosial yang akan diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sarasannya. Syarat penerimaan bantuan adalah masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria serta tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja. Keluarga kurang mampu yang semakin banyak memenuhi kriteria maka akan semakin

menjadi prioritas dari calon penerimaan BLT-DD (KOMPAK, 2020).

Mengenai ketentuan dari mekanisme pendapatan, penetapan data penerimaan manfaat hingga pelaksanaan pemberian BLT-DD dilakukan sesuai dengan aturan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Pihak yang bertanggung jawab atas pendataan penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri desa PDPTT Nomor 8 Tahun 2020, pendataan dilakukan berdasarkan RT, RW, dan desanya. Dana BLT ini dianggarkan dalam APB Desa dimana metode perhitungannya berdasarkan: 1) Jika desa yang menerima dana desa kurang dari Rp 800 Juta maka pengalokasian BLT-DD maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa, 2) Jika desa yang menerima dana desa sebesar Rp 800 Juta sampai dengan Rp 1,2 Milyar maka pengalokasian BLT-DD maksimal 30% dari jumlah dana desa, 3) Jika desa yang menerima dana desa lebih dari Rp 1,2 Milyar maka pengalokasian BLT-DD maksimal 35% dari jumlah dana desa, 4) Khusus desa yang jumlah masyarakat penerima BLT-DD lebih banyak dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran yang telah ditentukan maka dapat menambah alokasi sesuai dengan persetujuan dari pemerintah Kabupaten/Kota (Ombudsman.go.id).

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yang merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dari para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Afifiddin, 2010:3). Pengelolaan BLT-DD dapat dikatakan baik apabila pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pada dasarnya pengelolaan BLT-DD harus menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana transparansi pemerintah desa menjadi kunci bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai data keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, dan

besaran alokasi bantuan. Sementara akuntabilitas pemerintah desa menjadi landasan penting untuk mengelola dana tersebut.

Penyaluran BLT-DD di lapangan banyak yang tidak tepat sasaran, warga yang seharusnya mendapatkan BLT-DD justru tidak mendapatkannya. Seperti kasus yang terjadi di Aceh kepala Ombudsman Aceh yang merupakan lembaga pengawasan dalam Penyelenggaraan pelayanan publik, Taqwaddin bersama pihaknya menyampaikan penelusuran terkait dana Bansos dan BLT-DD terlambat dalam penyalurannya serta minimnya informasi terhadap penerima bantuan hingga tidak tepat sasaran (www.kanalaceh.com). Sangat disayangkan dengan peristiwa ini, yang seharusnya dengan adanya BLT-DD dapat memberi keringanan bagi masyarakat akan tetapi yang terjadi justru mengandung polemik di tengah masyarakat.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyediakan informasi yang material dan relevan terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik bagi suatu organisasi untuk pihak yang membutuhkan serta sebagai pemangku juga pengelola kepentingan (Mahmudi, 2016:17). Transparansi merupakan prinsip yang memberi akses atau kebebasan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan informasi berupa kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Iznillah,dkk, 2018:29-41). Adapun manfaat transparansi adalah sebagai berikut Nico Andrianto, (2007:21):

- 1) Mencegah terjadinya tindakan korupsi;
- 2) Mempermudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
- 3) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengukur kinerja Lembaga;
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam memberikan keputusan kebijakan tertentu;
- 5) Menguatnya kohesi sosial yang dikarnakan masyarakat percaya terhadap lembaga tersebut; dan

- 6) Meningkatkan iklim investasi yang baik serta meningkatkan kepastian usaha.

Keberhasilan yang dicapai untuk mengukur transparansi menurut Sedarmayanti (2013) yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketika terdapat keleluasaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tentang pelayanan;
- 2) Mudah untuk mengakses informasi pelayanan;
- 3) Terdapat prosedur pengaduan jika informasi tidak sampai ke publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja yang harus diterapkan oleh seorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang memberikan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Lestari,dkk, 2014).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Astuty (dalam Sumpeno; 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Permasalahan yang dimaksud merupakan masalah keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan sebagai tingkat kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas pengelolaan BLT-DD mengarahkan agar aparat desa dapat mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan BLT-DD, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban. Keberhasilan yang dicapai untuk mengukur akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2013) yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab atas kelalaian pelayanan;
- 2) Menjalankan prosedur dan mekanisme kinerja organisasi;
- 3) Mendahulukan memberi layanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

BLT-DD merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan disalurkan kepada masyarakat miskin serta rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama yang terkena dampak wabah covid-19 (KOMPAK,2020). Pemerintah desa wajib menyelenggarakan kegiatan BLT-DD sebagai salah satu cara untuk penanganan pandemic covid-19 (PMK No.40/PMK.07/2020). Berdasarkan Peraturan Bupati no.3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen dimana masyarakat miskin serta rentan yang berhak menerima BLT-DD berupa masyarakat yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan masyarakat yang tidak menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja dan Bantuan Sosial pemerintah lainnya.

Pengelolaan BLT-DD ini sama halnya seperti pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indikator, menurut Fitriyani,dkk (2020:134) yaitu sebagai berikut:

- a) Perencanaan
- b) Pelaksanaan
- c) Penatausahaan
- d) Pelaporan
- e) Pertanggung jawaban

Apabila pemerintah desa tidak menyalurkan BLT-DD maka desa tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun

2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 47A, Desa wajib melaksanakan BLT-DD. Sanksi tersebut berupa:

- 1) Penyaluran dana desa tahap-III tahun berjalan akan dihentikan; dan
- 2) Akan dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% dari dana desa tahap-II tahun anggaran berjalan bagi pemerintah desa yang berstatus Mandiri.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik (Kuncoro, 2013). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan wilayah yang meliputi subjek maupun objek serta memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari serta dapat disimpulkan berdasarkan populasi tersebut (Sekaran & Bougie, 2017:53). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dimana jika jumlah populasinya besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi, dikarenakan seperti keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81).

Penelitian ini bersifat sensus dimana seluruh populasi merupakan sampel sebagai data penelitian. Sasaran populasi pada penelitian ini merupakan seluruh desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sebanyak 23 desa dengan sasaran kuesioner ditujukan kepada 3

orang di setiap desa yaitu kepala desa, tuha 4 dan bendahara dengan total 69 orang.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa hasil angket dari penyebaran kuesioner yang telah dibagikan kepada responden terkait dengan pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket).

Metode Analisis Data

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk melihat adakah pengaruh lebih dari satu variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2018:8). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

α = Konstanta

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel X

ε = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun hasil deskripsi hasil kuisioner penelitian variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Kuesioner Penelitian

Variabel	Item	SS	S	RR	TS	STS	Rata
Transparansi (X1)	X _{1,1}	50	19	0	0	0	4,7
	X _{1,2}	44	25	0	0	0	4,6
	X _{1,3}	34	35	0	0	0	4,5
	X _{1,4}	15	52	2	0	0	4,2
	X _{1,5}	53	16	0	0	0	4,8
	X _{1,6}	42	25	2	0	0	4,6
	X _{1,7}	43	26	0	0	0	4,6

		Rata-Rata					4,6
Akuntabilitas (X2)	X _{2,1}	45	24	0	0	0	4,7
	X _{2,2}	30	39	0	0	0	4,4
	X _{2,3}	39	24	6	0	0	4,5
	X _{2,4}	31	37	1	0	0	4,4
	X _{2,5}	33	36	0	0	0	4,5
	X _{2,6}	32	37	0	0	0	4,5
	X _{2,7}	28	37	4	0	0	4,3
		Rata-Rata					4,5
Pengelolaan BLT-DD (Y)	Y ₁	50	19	0	0	0	4,7
	Y ₂	46	23	0	0	0	4,7
	Y ₃	41	28	0	0	0	4,6
	Y ₄	33	36	0	0	0	4,5
	Y ₅	45	24	0	0	0	4,7
	Y ₆	39	30	0	0	0	4,6
	Y ₇	39	30	0	0	0	4,6
		Rata-Rata					4,6

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan pengujian terhadap kuesioner yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara mengukur valid atau tidaknya kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dimana jika r hitung lebih besar daripada r tabel dan berkorelasi positif maka butir pertanyaan tersebut valid (Sujarweni, 2015). Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Setiap Item

Variabel	Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Sig	α	Ket.
Transparansi (X1)	X _{1,1}	0,314	0,2369	0,009	0,05	Valid
	X _{1,2}	0,652		0,000		Valid
	X _{1,3}	0,543		0,000		Valid
	X _{1,4}	0,428		0,000		Valid
	X _{1,5}	0,352		0,003		Valid
	X _{1,6}	0,619		0,000		Valid
	X _{1,7}	0,558		0,000		Valid
Akuntabilitas (X2)	X _{2,1}	0,381	0,2369	0,001	0,05	Valid
	X _{2,2}	0,433		0,000		Valid
	X _{2,3}	0,751		0,000		Valid
	X _{2,4}	0,597		0,000		Valid
	X _{2,5}	0,416		0,000		Valid
	X _{2,6}	0,361		0,002		Valid
	X _{2,7}	0,557		0,000		Valid

Pengelolaan BLT-DD (Y)	Y ₁	0,510	0,2369	0,000	0,05	Valid
	Y ₂	0,499		0,000		Valid
	Y ₃	0,679		0,000		Valid
	Y ₄	0,667		0,000		Valid
	Y ₅	0,653		0,000		Valid
	Y ₆	0,440		0,000		Valid
	Y ₇	0,590		0,000		Valid

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukur yang sama (Sugiyono, 2010). Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dengan bantuan software SPSS. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah item	Keterangan
Transparansi (X ₁)	0,504	7	Sedang
Akuntabilitas (X ₂)	0,525	7	Sedang
Pengelolaan BLT-DD (Y)	0,667	7	Tinggi

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Keseluruhan variabel mempunyai derajat realibilitas sedang, sehingga seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian dalam model regresi yang dikatakan baik apabila pada penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan hasil bahwa model tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Alat ukur yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov*, apabila data yang diuji berdistribusi normal maka hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05, sedangkan jika hasilnya berbanding terbalik maka dapat disimpulkan bahwa data

tersebut berdistribusi tidak normal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Uji Statistik	<i>P-Value</i>
N	69
Kolmogorov-Smirnov	0,200

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Uji Multikoleniaritas

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoleniaritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai *Tolerance* 1 atau > 0,1 dan *VIF* < 10 maka tidak ada multikoleniaritas antar variabel independen dalam model regresi. Adapun hasil uji multikoleniaritas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>VIF</i>	<i>Tolerance</i>
Transparansi (X ₁)	1,229	0,814
Akuntabilitas (X ₂)	1,229	0,814

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang tidak mengalami heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik (Ghozali, 2016). Dalam pengujian ini menggunakan Uji Glejser, pengujian dilakukan dengan cara meregresikan nilai X atau variabel independen terhadap nilai residualnya. Apabila hasilnya menunjukkan signifikan > 0,05 dengan derajat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Adapun hasil uji multikoleniaritas dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	P-Value
Transparansi (X ₁)	0,623
Akuntabilitas (X ₂)	0,761

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Semua uji asumsi klasik telah terpenuhi, selanjutnya yaitu membangun persamaan model regresi linier berganda. Persamaan model regresi yang dibangun dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan BLT-DD di Kec. Kota Juang. Koefisien regresi ditampilkan pada Tabel 4.7:

Tabel 7. Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	9.992	4.192		2.384	.020		
Transparansi	.285	.131	.246	2.177	.033	.814	1.229
Akuntabilitas	.419	.115	.411	3.641	.001	.814	1.229

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Persamaan regresi linier berganda yang dibangun berdasarkan koefisien regresi pada Tabel 4.7 adalah sebagai:

$$Y = 9,992 + 0,285X_1 + 0,419X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi pada kedua variabel dependen yaitu Transparansi (X₁) dan Akuntabilitas (X₂) bernilai positif dengan nilai konstanta sebesar 9,992 menunjukkan bahwa apabila variabel Transparansi (X₁) dan Variabel Akuntabilitas (X₂) sama dengan nol, maka Pengelolaan BLT-DD akan meningkat sebesar 9,992.

Pengaruh Transparansi Terhadap BLT-DD

Variabel Transparansi (X₁) mempunyai nilai $t_{hitung} (2,177) > t_{table} (1,997)$ dan nilai $p\text{-value} (0,033) < \alpha (0,05)$, maka dapat diputuskan jika H₀ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan jika Transparansi (X₁) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan BLT-DD di Kec. Kota Juang (Y). Nilai Koefisien variabel Transparansi (X₁) sebesar 0,285 berarti apabila terjadi peningkatan transparansi sebesar 1% dengan asumsi variabel lain tetap, maka pengelolaan BLT-DD juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,285.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap BLT-DD

Variabel Akuntabilitas (X₂) mempunyai nilai $t_{hitung} (3,651) > t_{table} (1,97)$ dan nilai $p\text{-value} (0,001) < \alpha (0,05)$, maka dapat diputuskan jika H₀ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan jika Akuntabilitas (X₂) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan BLT-DD di Kec. Kota Juang (Y). Nilai Koefisien variabel Akuntabilitas (X₂) sebesar 0,419 berarti apabila terjadi peningkatan akuntabilitas atau rasa bertanggungjawab sebesar 1% dengan asumsi variabel lain tetap, maka pengelolaan BLT-DD juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,419.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 8. Pengujian Simultan dengan Uji F

Model	F-hitung	P-value
Regresi Linier Berganda	15,265	0,000

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F), menunjukkan nilai $F_{hitung} = 15,265$ dan $p\text{-value} = 0,000$. Nilai $F_{hitung} (15,265) > F_{table} (3,1359)$ dan nilai $p\text{-value} (0,000) < \alpha (0,05)$, maka dapat diputuskan jika H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga dapat disimpulkan jika Transparansi (X₁) dan Akuntabilitas (X₂) secara bersama-sama

(simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan BLT-DD di Kec. Kota Juang (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen yang dimasukkan kedalam model dapat menjelaskan variasi dari variabel dependennya.

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model	R	R^2	Adjusted R^2
Regrsi Linier Berganda	0,562 ^a	0,316	0,296

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) model regresi sebesar 0,316. Hal tersebut mengindikasikan jika variabel Transparansi dan Akuntabilitas dapat menjelaskan Pengelolaan BLT-DD sebesar 31,6%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model yang dianalisis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi (X_1) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y). Sifat perencanaan, penyaluran, dan pelaporan BLT-DD yang bersifat transparan penting dan telah dilakukan oleh desa-desa di Kec. Kota Juang demi menghindari kecurangan dalam pengelolaan BLT-DD. Beberapa hal yang dilakukan yaitu melakukan musyawarah penentuan penerimaan BLT-DD dan pemanfaatan media papan informasi.
2. Variabel Akuntabilitas (X_2) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y). Akuntabilitas atau

pertanggungjawaban sangat penting dilakukan, salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat dilaksanakan dengan pemberitahuan realisasi anggaran di Balai Desa.

3. Variabel Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y).

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya terus meningkatkan sifat transparansi dalam penyampaian informasi pengelolaan keuangan dan melakukan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dengan jelas demi menghindari kecurangan, baik dalam program BLT-DD maupun program lain yang akan dilakukan di masa depan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, variabel dalam penelitian ini masih sangat terbatas, perluasan dan penambahan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh dalam pengelolaan BLT-DD perlu dilakukan, sehingga model akan semakin baik serta pengelolaan BLT-DD semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifiddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Albugis, Febriana F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3, 78-89.
- Andrianto, Nico. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publisng.
- Asmoro, Wiwiek K. Setianingsih, Novie A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi

- Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan *Good Government Governance* di Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 270-277.
- Assagaf, M. Ashari. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. *Skripsi*
- Bahtiar, D., & D. Ardiansyah. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. *Jurnal EMak (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)*, 5(1).
- BAPPENAS. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa). Diakses pada Juni 2020 <file:///D:/transparansi%20akuntabilitas/Buku_Saku_Pendataan_BLT_Dana_Desafinal.pdf>.
- Danirandi. (2020). Ombudsman Aceh Temukan Banyak Masalah Penyaluran Bansos dan BLT. Diakses pada 20 Mei 2020 <<https://www.kanalaceh.com/2020/05/20/ombudsman-aceh-temukan-banyak-masalah-penyaluran-bansos-dan-blt/>>.
- Dewi, Ni K.J.K, T.A. Anantawikrama, & T.H Nyoman. (2015). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, (1).
- Firdaus, A., Suharno & Sunarti. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 291-300.
- Fitriyani, L. Y., Marita, Windiyastuti, & M. Absor. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Lima Desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal EKSOS*, 2(2).
- Frost, Jim. (2019). *Regression Analysis: An Intuitive Guide for Using and Interpreting Linear Models*. Jakarta: Jim Publishing.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Humas. (2020, Mei 9). *Kemendes PDDT Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan Semangat Gotong Royong* <<https://setkab.go.id/kemendes-pdtt-bentuk-relawan-desalawan-covid-19-dengan-semangat-gotong-royong/>>[21/1/2021].
- Husin Taqwaddin. (2020, April 21). *Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa* <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desafinal>>[21/1/2021].
- Idham khalid. (2020, juni 19). *BLT Rp 600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa ke Kejaksaan* <<https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/08261781/blt-rp-600000-hanya-dibagikan-rp-150000-warga-laporkan-kepala-desake?page=all>>[21/1/2021].
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Imawan, Wynandin. (2008). *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Jakarta : Bappenas.
- Imawan, Wynandin. (2008). *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Jakarta : Bappenas.
- Iznillah, M.L., A. Hasan, & Y. Mutia. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7.

- Jaa, Emilianus. Sulisty, Supami W. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. 7(1), 1-9.
- Kanisius Ola Mangu. (2020). *Akuntabilitas dan Fleksibilitas Pelayanan Bansos Covid-19* <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--akuntabilitas-dan-fleksibilitas-pelayanan-bansos-covid-19>>[21/1/2021].
- Khairudin, & R. Erlanda. (2016). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota se-sumatra). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2, 137 – 140.
- Khairudin. Tarmizi, Rosmiati, Soedarsa Herry G, Erlanda, Rina. (2016). The Influence of Transparency and Accountability Local Government Financial Report on The Level of Corruption Local Government of Sumatera Area. *The 3rd International Conference on Law, Business and Government Universitas Bandar Lampung (UBL), Indonesia*, 146 – 158. *Proceedings*.
- Kisnawati, B., Y. Astini, & R.N. Oktaviani. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Ilmiah VALID*, 15.
- Kumalasari, D., & I.B. Riharjo. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5.
- Lestari, A.K.D., A.T. Atmadja, & I.M.P. Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mas'ut & Saragih, I., Alimuddin. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan). *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(18).
- Mashabi Sania. (2020). *Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19, Dari Bansos Hingga Subsidi Bagi UMKM* <<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/19424371/upaya-pemerintah-tanggulangi-kemiskinan-akibat-pandemi-covid-19-dari-bansos>>[21/1/2021].
- Moksony, Ference. (1990). Small is Beautiful. The Used and Interpretation of R² in Social Research. *Szociologiai Szamle, Special Issue*, 130 – 138.
- Mudrajad, Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Muljo, Hery H. Kurniawati, Heni. Pahala. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Binus Business Review*, 5(2), 537 – 550.
- Putra, I Made Y D. Rasmini, Ni Ketut. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74 - 80
- Putra, P.A., K.Sinarwati, & M.A.Wahyuni. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*, 8.

- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Bireuen No.3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rian. (2020). *Transparansi Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19* <<https://thecolumnist.id/artikel/transparansi-dana-desa-dalam-penanganan-covid19-806#>>[21/1/2021].
- Ruseffendi, E.T. (2010). *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Noneksakta Lainnya*. Bandung: Tarsito.
- Sedarmayanti. (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Simanjourang, Christina N. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.
- Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press
- Sukmawati, F., & A. Nurfitriani. (2019). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2(1), 52-66.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read Indonesia.
- Syafi'i. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pudungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. *Skripsi*.
- Waluyo. (2009). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Widiyanti, Arista. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. *Skripsi*.